

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Tinjauan Teori

1.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan merupakan teori yang menyangkut hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agen*) yang berbeda kepentingan. Konflik kepentingan antara *principal* dan *agen* terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan keinginan *principal* (Pagalung (2011) dalam Amelia & Hernawati, 2016). Para pemegang saham mempunyai hak suara yang relatif sama untuk menginginkan kesejahteraan bagi mereka. Pihak manajer bertanggungjawab untuk kesejahteraannya dan ia juga mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingannya. Akibatnya, manajer tidak lagi bekerja untuk kepentingan dan kesejahteraan pemegang saham tetapi bekerja untuk kesejahteraannya sendiri. Konflik ini menjadikan pihak pemegang saham menjadi melemah sehingga manajemen dapat dengan luluasa melakukan praktik manajemen laba.

Teori keagenan menjadi dasar dalam *corporate governance* yang sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dari dana yang mereka investasikan.

1.1.2 Corporate Governance

1.1.2.1 Definisi dan Tujuan Corporate Governance

Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia* (FCGI) dalam Arief, M (2016) *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan sistem, proses, pengaturan perusahaan untuk mengatur kinerja perusahaan dalam hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan.

Tujuan dari *corporate governance* adalah untuk menciptakan *value added* bagi semua pihak yang berkepentingan dan meningkatkan kepercayaan kepada perusahaan.

1.1.2.2 Prinsip-Prinsip *Corporate Governance*

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dalam Pratama & Mustamu (2013) menyatakan prinsip-prinsip dasar penerapan *corporate governance* adalah sebagai berikut:

1. *Transparency* (transparansi)

Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan serta mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan undang-undang tetapi juga hal penting untuk pengambil keputusan perusahaan.

2. *Accountability* (akuntabilitas)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan transparan. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terstruktur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

3. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. *Independency* (independensi)

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. *Fairness* (keadilan/kewajaran)

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan proksi proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit sebagai indikator pengukuran *corporate governance*.

i. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dalam Pratama & Mustamu, 2013). Sedangkan menurut Puspitasari & Rustiana (2014) menyatakan bahwa komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang telah memenuhi persyaratan antara lain:

1. Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

“Istilah dan keberadaan komisaris independen baru muncul setelah terbitnya Surat Edaran Bapepam Nomor: SE03/PM/2000 dan Peraturan Pencatatan Efek Nomor 339/BEJ/07 – 2001 tgl 21 Juli 2001. Menurut

ketentuan tersebut perusahaan publik yang tercatat di bursa wajib memiliki beberapa anggota dewan komisaris yang memenuhi kualifikasi sebagai komisaris independen yaitu jumlah komisaris independen adalah sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah anggota komisaris, perlunya dibentuk komite audit serta keharusan perusahaan memiliki sekretaris perusahaan” (Januarti & Sentosa, 2009 dalam Yendrawati, 2015). Peran komisaris yang dibentuk diharapkan dapat meminimalisir permasalahan yang muncul antara dewan direksi dan pemegang saham sehingga kinerja yang dihasilkan oleh perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dengan semakin banyaknya jumlah dewan komisaris yang ada maka diharapkan dapat meminimalisir manajemen laba karena dapat meningkatkan *corporate governance*.

ii. Kepemilikan Manajerial

Menurut Terzaghi (2012) dalam L Azhar (2014) mengemukakan kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola. Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan perusahaan dapat diukur dengan menghitung persentase saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dengan seluruh jumlah saham perusahaan yang beredar.

Kepemilikan manajerial akan mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan, karena mereka juga memiliki perusahaan (Sujoko & Soebiantoro, 2007 dalam Puspitasari & Rustiana, 2014)

iii. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain (Puspitasari & Rustiana, 2014). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam manajemen karena dapat meningkatkan pengawasan yang lebih optimal. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin besar

kekuatan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen sehingga manajemen akan mengoptimalkan kinerja perusahaan, akibatnya manajemen laba akan berkurang.

iv. Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan direksi dalam rangka membantu serta mengawasi tugas dari direksi untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan (Widjaja, 2008 dalam Firmansyah, Pratomo & Yudowati, 2016). Dalam Peraturan Bapepam no IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, pembentukan komite audit antara lain:

1. Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit
2. Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki pedoman kerja (piagam komite audit).
3. Komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris.
4. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang, yaitu 1 adalah komisaris independen dan 2 orang lainnya adalah berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.

Komite audit memiliki tugas terpisah dalam membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengawasan secara menyeluruh. Tujuan komite audit adalah memungkinkan dewan komisaris untuk memberikan penilaian independen atas kinerja keuangan perusahaan, memperkuat posisi auditor eksternal, memperkuat independensi dan obyektivitas auditor internal dalam memberikan rekomendasi perubahan maupun memperbaiki kualitas pelaporan keuangan.

1.1.2.3 Manfaat Corporate Governance

Menurut *Forum Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dalam Desiana, dkk (2016) menyatakan ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari penerapan *corporate governance* yang baik antara lain:

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*.
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *stakeholders value* dan dividen.

1.1.3 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala pengukuran perusahaan yang di klasifikasikan ke dalam besar kecilnya suatu perusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan dilihat dari total aktiva (*asset*), total penjualan (*net sales*) dan kapitalisasi pasar yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan. Dari ketiga variabel ini, variabel total aset sering digunakan dalam mengukur ukuran perusahaan karena nilai aset relatif lebih stabil dibandingkan dengan penjualan dan kapitalisasi pasar (Sutikno, Wahidahwati & Asyik, 2014)

1.1.4 Manajemen Laba

1.1.4.1 Pengertian Manajemen Laba

Menurut Scott (2011) dalam Yendrawati (2015) menyatakan pengertian manajemen laba adalah perilaku manajemen dalam memilih kebijakan akuntansi tertentu, atau menilai penerapan aktivitas tertentu, yang bertujuan mempengaruhi laba untuk mencapai sebuah tujuan spesifik. Sedangkan menurut Yaping dalam Sutikno dkk (2014) menyatakan manajemen laba dapat dibagi menjadi empat pengertian yaitu:

- (1) Manajemen laba adalah suatu *fraud* (penyimpangan)
- (2) Manajemen laba mengarah pada ketidakpatuhan pada laporan keuangan
- (3) Manajemen laba menunjukkan tipu daya
- (4) Manajemen memiliki efek kekayaan redistributif antar pihak-pihak terkait.

Dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan manajemen yang mengakibatkan pelaporan laba dilaporkan secara tidak sebenarnya, baik itu meningkatkan laba atau mengurangi laba.

1.1.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba

Menurut Scott dalam Perdana (2012), menyatakan berbagai motivasi perusahaan melakukan manajemen laba, yaitu:

- *Other Contractual Motivations*
Secara umum untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kontraktual, termasuk perjanjian hutang (*debts covenants*).
- *To Communicate Information To Investors*
Investor akan melihat kebijakan akuntansi yang dipilih ketika mengevaluasi dan membandingkan laba.
- *Political Motivations*
Untuk mengurangi biaya politis dan pengawasan dari pemerintah, untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas pemerintah seperti subsidi dan perlindungan dari pesaing luar negeri, untuk meminimalkan tuntutan serikat buruh, yang dilakukan dengan cara menurunkan laba.
- *Taxation Motivations*
Manajemen laba dilakukan untuk tujuan penghematan pajak, yaitu dengan cara memperkecil perolehan laba sehingga mengakibatkan apa yang dibayarkan kepada pemerintah juga lebih kecil dari yang seharusnya.
- *Changes of Chief Executif Officer (CEO)*
CEO yang mendekati akhir jabatannya, cenderung melakukan *income maximation* untuk meningkatkan bonus mereka.
- *Initial Publik Offerings (IPO)*
Perusahaan yang akan melakukan penawaran saham perdana (IPO), cenderung melakukan *income increassing* untuk menarik calon investor.

1.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian Pengaruh *Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba telah banyak di kaji oleh peneliti terdahulu misalnya:

1) Octavia (2017)

Meneliti mengenai implikasi corporate governance dan ukuran perusahaan pada manajemen laba pada 40 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2015. Hasil penelitian menemukan bahwa komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Secara simultan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan dan *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

2) Firmansyah *et al* (2016)

Meneliti mengenai pengaruh komisaris independen dan komite audit terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan secara parsial komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

3) Aorora (2018)

Meneliti mengenai pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba. Kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

4) Yendrawati (2015)

Meneliti mengenai pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak

berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba.

5) Mahariana (2014)

Meneliti mengenai pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional pada manajemen laba perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan, kepemilikan institusional tidak terbukti berpengaruh terhadap manajemen laba.

6) Kristiani *et al* (2014)

Meneliti mengenai pengaruh mekanisme corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba. Komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan secara simultan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Tabel 2.1
 Penelitian Terdahulu

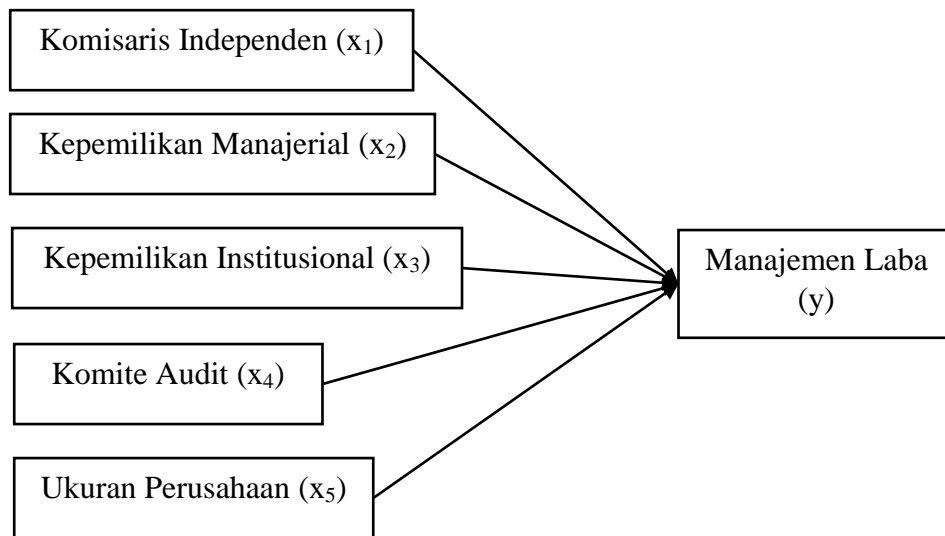
Nama Peneliti, tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Sampel, Metode Analisis	Hasil Penelitian
Evi Octavia (2017)	Implikasi Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan pada Manajemen Laba	Untuk mengetahui implikasi corporate governance dan ukuran perusahaan pada manajemen laba	Variabel: komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan. Variabel dependen: manajemen Laba Variabel intervening : leverage	Sampel: 40 perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2015. Metode Analisis Regresi Berganda	komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba

Firman syah <i>et al</i> (2016)	pengaruh komisaris independen dan komite audit terhadap manajemen laba	Membahas pengaruh komisaris independen dan komite audit terhadap manajemen laba	Variabel independen: komisaris independen dan komite audit. Variabel dependen: manajemen laba	Sampel berjumlah 56 sampel yang diobservasi. Metode analisis data menggunakan regresi data panel	Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
Anissa Aorora (2018)	pengaruh <i>good corporate governance</i> dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba	Mengetahui secara empiris pengaruh <i>good corporate governance</i> dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba	Varibabel independen: kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan komisaris independen, komite audit dan ukuran perusahaan. Variabel dependen: Manajemen laba	Sampel: 55 Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2016. Metode Analisis Regresi	Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba. Kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba

Reni Yendra wati (2015)	Pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap manajemen laba	Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap manajemen laba	Variabel independen: dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional . Variabel dependen: manajemen laba	Sampel: perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2013. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda	dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba.
I Dewa Gede Pingga Mahari ana (2014)	pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional pada manajemen laba	Menguji kembali pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional pada manajemen laba	Variabel independen: kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional . Variabel dependen: manajemen laba	Sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012. Menggunakan metode analisis regresi linier berganda	kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen

					laba.
Kadek Emi Kristian <i>i et al</i> (2014)	pengaruh mekanisme corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba	Untuk mengetahui pengaruh mekanisme corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba	Variabel independen: kepemilikan institusional , kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris, komite audit, dan ukuran perusahaan. Variabel dependen: manajemen laba	Sampel 11 perusahaan manufaktur yang tercatat pada BEI. Analisis data yang digunakan yaitu uji asumsi klasik	kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba. Komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba

1.3 Model Konseptual Penelitian



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Pengaruh *Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba

1.4 Pengembangan Hipotesis

1.4.1 Komisaris Independen dan Manajemen Laba

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Guna & Herawati, 2010). Proporsi dari komisaris independen yaitu sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah anggota komisaris. Proporsi independen yang lebih tinggi diharapkan dapat mendorong fungsi pengawasan yang lebih efektif yang kemudian laporan keuangan menjadi dapat di andalkan dan prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat ditegakkan dengan baik (Surya, 2008).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa komisaaris independen memiliki hubungan yang erat dengan manajemen laba. Evi (2017) mengatakan bahwa komisaris independen berpengaruh secara signifikan negatif karena besar kecilnya komposisi dewan komisaris tidak berdampak pada manajemen laba.

Firmansyah *et al* (2016) yang mengatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba karena persentase komisaris independen tidak mampu mengutangi praktek manajemen laba.

Berdasarkan teori dan penelitian beberapa peneliti sebelumnya maka dapat diasumsikan bahwa tingkat dewan komisaris independen sangatlah penting dalam sebuah perusahaan. Komisaris independen berpengaruh dalam meminimalisir manajemen laba di dalam perusahaan. Semakin tinggi tingkat komisaris independen dalam suatu perusahaan maka semakin baik untuk mengawasi manajer dalam bertindak kecurangan, sebaliknya jika semakin rendah tingkat komisaris independen dalam suatu perusahaan maka semakin lemah pengawasan manajer dalam bertindak kecurangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Kepemilikan independen berpengaruh terhadap manajemen laba

1.4.2 Kepemilikan Manajerial dan Manajemen Laba

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Jika manajer mempunyai kepemilikan pada perusahaan maka manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena manajer juga mempunyai kepentingan di dalamnya (Kristiani, 2014). Kepentingan manajer yang pemegang saham dengan manajer yang bukan pemegang saham seringkali memiliki perbedaan motivasi. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Maiyusti (2014) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin kecil kepemilikan manajerial akan cenderung meningkatkan manajemen laba. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Octavia (2017) menyatakan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. Artinya, semakin rendah tingkat kepemilikan manajerial pada perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat terjadinya praktik manajemen laba.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu mengenai kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Hal tersebut karena tingkat kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap praktik manajemen laba.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba

1.4.3 Kepemilikan Institusional dan Manajemen Laba

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan oleh institusi lain yang diharapkan dapat mengurangi perilaku manajemen laba yang dilakukan manajer. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin kuat kontrol eksternal terhadap perusahaan. Adanya kepemilikan oleh investor institusional maka mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga dapat mengurangi tindakan manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Aorora (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Artinya, semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kecil praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu mengenai kepemilikan institusional terhadap manajemen laba, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Hal tersebut karena struktur kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi dianggap lebih mampu dalam mendeteksi kesalahan laporan keuangan yang terjadi karena investor institusi lebih berpengalaman dibandingkan dengan investor individual.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap manajemen laba

1.4.4 Komite Audit dan Manajemen Laba

Komite audit yang ahli dalam bidang keuangan merupakan pihak yang efektif dapat mengurangi tindakan manajemen laba. Hal tersebut karena komite audit

berpengalaman dalam menganalisis laporan keuangan termasuk mendeteksi kecurangan seperti manajemen laba.

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite sebanyak satu orang dari komisaris yang merupakan komisaris independen dan sekaligus ketua komite. Anggota lainnya yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal lainnya yang independen,

Penelitian Wardhani & Joseph (2010) menguji latar belakang akuntansi dan keuangan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila ketua komite audit memiliki pengalaman di bidang akuntansi dan keuangan maka hal tersebut akan dapat menurunkan nilai manajemen laba dalam suatu perusahaan.

Berbeda dengan penelitian Wedari (2014) yang menguji pengaruh komite audit terhadap praktik manajemen laba menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Artinya, komite audit belum berhasil mengurangi manajemen laba karena keberadaan mereka manajer dapat melakukan manajemen laba dengan lebih leluasa.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu mengenai komite audit terhadap manajemen laba, dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Hal tersebut karena komite audit yang berpengalaman di bidang akuntansi belum berhasil mengurangi manajemen laba yang terjadi di perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4: Komite Audit berpengaruh terhadap manajemen laba.

1.4.5 Ukuran Perusahaan dengan Manajemen Laba

Ukuran perusahaan merupakan skala yang menunjukkan besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Pada umumnya proksi pengukuran perusahaan menggunakan total aktiva dan total penjualan. Ukuran perusahaan sangat penting bagi kreditor

dan investor dalam pengambilan keputusan karena berhubungan dengan resiko investasi yang dilakukan.

Menurut Cheng, Lee & Shevlin (2016) dalam Octavia (2017) menemukan bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba pada perusahaan di Amerika. Perusahaan yang lebih besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan manajemen laba dibandingkan perusahaan kecil. Berdasarkan penelitian Aorora (2018) diperoleh fakta ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan menurut Reviani & Sudantoko (2012) mengatakan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan karena masih terdapat perusahaan besar yang membutuhkan dana dari investor sehingga diperlukannya manipulasi laporan keuangan untuk menarik perhatian investor.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu mengenai ukuran perusahaan terhadap manajemen laba, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Hal tersebut karena perusahaan kecil dan besar sama-sama tidak melaporkan laporan keuangan mereka pada kondisi yang sebenarnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H5: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba.